

**Candra Widitya Wahyu Putra, NIM. 105010113111020, Hukum Perdata
Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2014.**

**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI
LAGU TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET
DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”,**

Dr. Sihabudin, S.H., M.H., M.Zairul Alam, S.H., M.H.,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail : candraputraib@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Radio Internet, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , di samping merek, paten dan rahasia dagang yang juga termasuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu terdapat konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak cipta khususnya di era globalisasi dimana media digital merupakan media yang paling sering digunakan, konvensi tersebut ialah WIPO *Copyright Treaty* (WCT). Salah satu media digital yang digunakan dalam memperoleh informasi ialah media Radio Internet. Di Negara Inggris dan Amerika Serikat mengadopsi aturan *Digital Millenium Copyright Act* yang dituangkan di dalam dalam syarat dan ketentuan, sedangkan radio internet di Indonesia tidak mencantumkan syarat dan ketentuan yang ada di situs radio internetnya.

Di dalam syarat dan ketentuan tersebut mencantumkan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta di dalam radio internet. Menurut undang-undang hak cipta sendiri apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui 2 jalur, yakni melalui jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

ABSTRAK

Keywords: copyright protection, Internet Radio, Act No. 19 of 2002.

Copyright is one of the parts of a right kekayaan intelektual (hki), in addition to the brands, patent and trade secret which also included in that part of the intellectual wealth right. Copyright protection in Indonesia regulated in the law number 19 year 2002 on copyright. Moreover, there were the international convention which regulates copyright protection especially in the era of globalization where the digital media is the most frequently used, media the convention: WIPO copyright treaty (wct). One of the digital media employed in obtaining information: radio media the internet. In the english and united states adopt the rules of Gigital Millennium Copyright Act being poured onto in dalam terms and provisions, while internet radio in indonesia does not mention the conditions and regulations on the site of radio the internet.

In these terms and conditions include the process of settlement of sengketa in the event of copyright infringement in internet radio. According to the Copyright Act itself in the event of a dispute can be resolved through two pathways, i.e. via the litigation or through the courts and alternative dispute resolution outside the Court (arbitration) or with alternative dispute resolution mechanisms.

Latar Belakang

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di samping merek, paten dan rahasia dagang yang juga termasuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kekayaan intelektual merupakan suatu keistimewaan, karena hadirnya karya intelektual yang lahir dari kemampuan manusia, perlu untuk dilindungi agar mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati atas hak-hak manusia dalam hak kekayaan intelektual, karena dari kekayaan intelektual tersebut mendorong terjadinya kompetisi dalam keberadaannya di kehidupan masyarakat.

Di era saat ini di mana segala sesuatu telah dipermuda oleh adanya teknologi terutama teknologi informasi dan telekomunikasi seperti halnya media elektronik. Akan tetapi perkembangan teknologi yang sangat cepat tersebut tidak selamanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Setiap saat berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi harus siap dihadapi oleh hukum. Permasalahan yang muncul tersebut merupakan bagian dari sisi negatif perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Bagian dari sisi negatif tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama masalah Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan hak privat, yang artinya Hak Kekayaan Intelektual dimiliki oleh seseorang atau badan hukum secara eksklusif.¹ Apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif, maka pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengontrol secara penuh atas hak yang melekat pada HAKI-nya, dan pemegang hak cipta juga punya kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.²

Melalui teknologi informasi dan telekomunikasi karya-karya intelektual berupa program komputer dan obyek-obyek hak cipta yang ada di media komunikasi dengan sangat mudah dapat dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Salah satunya ialah banyaknya iklan suara (radio) dan perbuatan pengumuman karya cipta di dalam era musik digital yang sangat sulit untuk dipantau. Hak cipta

¹ Muchammad Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta, 2012 hal 16.

² Muchammad Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta, 2012 hal 16-17.

atas lagu wajib dilindungi dari pihak yang tidak adanya itikad baik seperti memperbanyak atau mengumumkan yang digunakan untuk tujuan komersial, dan tanpa seijin penciptanya.

Pengertian hak cipta itu sendiri telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dijelaskan bahwa: hak cipta itu sendiri sebenarnya adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini sendiri berlaku untuk bentuk karya cipta yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran hak cipta yang sangat marak terjadi maka pengaturan tentang hak eksklusif telah diatur didalam undang-undang hak cipta yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1).

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual maka hukum menganggap karya cipta merupakan suatu kekayaan, sehingga harus mendapat perlindungan, dan keberadaan perlindungan tersebut dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2003.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, salah satunya merupakan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.³

Ciptaan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. (Pasal 12 ayat (3) UUHC).⁴

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam bidang Hak Cipta merupakan penyebab terjadinya indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain terutama dalam hal ruang lingkup hak cipta.

Dari sekian banyak hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta merupakan hak yang lebih sensitif dalam artian sangat rentan terjadinya pelanggaran. Bisa dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta masih sangat marak terjadi di Indonesia. Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia

³ Muchammad Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta, 2012 hal 16-17.

⁴ Indonesia, **Undang-Undang Tentang Hak Cipta. No. 19 Tahun 2002**, ps 12 angka 2 dan 3 bahwa yang dimaksud ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli dan berlaku juga untuk semua ciptaan yang tidak atau belum di umumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya.

dikarenakan semata-mata karena kurang pemahaman terhadap peraturan yang mengatur dalam bidang hak cipta, namun factor-faktor tersebut terjadi karena adanya factor non hukum yang ikut mempengaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta.

Sejalan dengan itu penegakan hukum terkait dengan hak cipta yang diterapkan pun terkesan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Akibatnya masih banyak orang yang kurang menghargai ciptaan orang lain, salah satunya dalam bidang musik atau lagu terutama dalam hal pengumuman yang dilakukan menggunakan media telekomunikasi.

Jika dulu kita hanya bisa mendengar atau menyaksikan segala informasi yang ada di dunia ini baik berita hingga hiburan melalui radio atau televisi tradisional yang disiarkan dengan transmisi gelombang elektromagnetik, internet telah membuat revolusi informasi dengan munculnya televisi internet (web TV) dan juga radio internet (yang juga dikenal dengan web radio).

Sebagaimana dengan tv internet dan radio internet yang berbasis web itu juga menyajikan video dan audio, namun dalam hal bentuk transmisi digital yaitu dengan cara streaming. Dengan kemajuan teknologi tersebut, kualitas video dan audio streaming sekarang semakin meningkat dan juga lebih mudah diakses asalkan dengan adanya jaringan yang memadai maka video dan audio streaming dapat diakses sewaktu-waktu di lokasi manapun tanpa adanya batasan wilayah.

Malah radio internet bisa menjadi komplimen yang sangat mendukung bisnis radio mereka, tidak hanya berimbas pada pangsa pendengar namun juga bisa memperluas dari segi segmen bisnis. Pada umumnya semua perlengkapan termasuk software untuk membuat radio internet dapat dikatakan murah, bahkan bisa dikatakan gratis. Oleh karena itu pembuatan radio internet dapat dilakukan oleh semua orang.

Untuk perlindungan hukum hak cipta terutama jika dikaitkan dengan hak ekonomi yang terdapat di dalam hak cipta, maka untuk perlindungan hak cipta terhadap pengumuman karya cipta yang berbentuk musik atau lagu di dalam radio tradisional dapat dilakukan dengan skema pembayaran royalti berdasarkan performing right. Mereka hanya perlu membayar flat royalti per lagu yang diputar karena tidak mungkin menghitung jumlah pendengarnya. Namun bagaimana

dengan penentuan royalti bagi lagu yang disiarkan melalui media audio streaming dalam hal ini radio internet. Menurut hukum hak cipta Amerika Serikat, penyiaran lagu melalui radio internet juga merupakan bagian dari performing right.

Berdasarkan hukum royalti hak cipta Amerika Serikat yaitu "Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004" (efektif tahun 2005) melalui Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat (U.S. Copyright Royalty Board) mengatur bahwa setiap lagu melalui streaming yang didengar oleh pengguna internet akan dikenakan royalti. Namun bagaimana dengan Indonesia? Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak cipta bagi pemilik atau pemegang hak cipta, tetapi bunyi undang-undang tersebut masih umum, tidak mendetail sehingga terjadi kerancuan tentang perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio internet. Sehingga belum didapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta yang disiarkan oleh radio internet, apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar Amerika Serikat atau standar lainnya.

Selain itu penulis akan membandingkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak radio internet di Negara luar dengan Negara Indonesia. Di radio internet di Negara luar hampir seluruhnya mencantumkan bentuk perlindungan hukum hak cipta yang dituangkan di dalam syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situs radio internet itu sendiri, sedangkan di Negara Indonesia hampir rata-rata atau bisa dikatakan keseluruhan radio internet di Negara Indonesia tidak mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai perlindungan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa apabila ditemukan pelanggaran dalam hal pelanggaran hak cipta.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui radio internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

Pembahasan

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Dalam Pengumuman Karya Cipta Lagu Melalui Radio Internet.

Perkembangan teknologi infomasi semakin hari semakin pesat. Perkembangan teknologi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang kian hari kian pesat dapat mempermudah melakukan tindakan hukum tanpa bersusah payah. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka akan membawa indikasi pelanggaran hukum yang lebih mudah dilakukan oleh siapa saja. Jadi selain terdapat dampak positif juga terdapat dampak negatif.

Karena dengan adanya pergeseran itu, maka tidak heran dalam setiap aspek kehidupan manusia mulai menunjukkan suatu fenomena baru seperti halnya di dalam ruang lingkup hak cipta. Hal tersebut dapat dilihat dalam suatu kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan serta seni dan sastra.

Jika berbicara mengenai karya cipta, maka dengan adanya perkembangan teknologi tersebut suatu karya dapat dengan mudah diumumkan melalui media internet atau *online*, dari hal-hal tersebut dapat menimbulkan suatu tantangan baru

dalam bidang hukum, terutama dalam lingkup hak cipta.⁵ Keterkaitan hak cipta dan teknologi mulanya diatur secara detail dalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT) khususnya dalam hal mengumumkan dan memperbanyak, dsb melalui media apapun. Dalam hal ini radio internet juga termasuk media yang bisa digunakan untuk mengumumkan.

2. Perlindungan Hak Cipta didalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT)

Kebutuhan perlindungan teknologi atas ciptaan digital merupakan suatu hal yang penting, sebagai upaya untuk melindungi ciptaan digital dari tindakan pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual yang merupakan kaitan erat dalam *Digital Right Management* (DRM). Keterkaitan tersebut dikarenakan hak cipta merupakan bagian yang terdiri dari segi isi digital yang mempunyai ketergantungan tinggi. Pada mulanya *Digital Right Management* merupakan suatu sarana kontrol terhadap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, yang bertujuan untuk melindungi segala macam materi hak cipta dan eksploitasinya.

Terdapat 2 perlindungan menurut *Digital Right Management*, anatara lain yaitu perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan *Right Management Information* (RMI).

Technological Protection Measures (TPM) sendiri merupakan untuk melindungi karya digital baik dengan cara membatasi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi, atau berfungsi sebagai kontrol. Sedangkan *Digital Right Management* (DRM) itu sendiri bertujuan untuk melindungi informasi yang terkandung di dalam karya cipta itu sendiri.

Prinsip perlindungan hak cipta yang terdapat dalam WIPO telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam *WIPO Copyright Treaty*, yaitu antara lain pasal 11 *WIPO Copyright Treaty* yang mengatur tentang *Technological Protection Measures* yang menyatakan:

*Obligations concerning Technological Measures*⁶

⁵ Asril Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 8.

⁶ Article 11, WCT

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Berdasarkan bunyi pasal 11 di atas mengenai *Technological Measures* dapat diartikan bahwa para pihak yang memegang hak cipta wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif yang digunakan oleh pemegang hak cipta sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka dibawah perjanjian ini atau konvensi berne dan yang membatasi penggunaan karya yang tidak diizinkan oleh pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Di dalam pasal 12 WIPO *Copyright Treaty* yang mengatur tentang *Right Management Information* yang menyatakan:

*Obligations concerning Rights Management Information*⁷

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

- (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
- (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*

(2) As used in this Article, "rights management information" means

⁷ Article 12 WCT

information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Terjemahan bebas dari pasal 12 WIPO *Copyright Treaty*:

Kewajiban memperhatikan Hak Informasi Manajemen

- (1) Para pihak wajib menyediakan bantuan hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang sengaja melakukan salah satu dari tindakan terhadap setiap orang yang sengaja melakukan salah satu dari tindakan berikut mengetahui, atau sehubungan dengan pemerintahan memiliki alasan yang kuat untuk tahu, bahwa itu akan mendorong, mengaktifkan, memfasilitasi atau menyembunyikan pelanggaran dari hak yang dicakup oleh Perjanjian ini atau konvensi Berne;
 - (i) Untuk menghapus atau mengubah informasi hak manajemen elektronik tanpa otoritas;
 - (ii) Untuk mendistribusikan ,mengimpor untuk distribusi, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik, tanpa otoritas, bekerja atau salinan karya mengetahui bahwa informasi manajemen hak elektronik telah dihapus atau diubah tanpa otoritas.
- (2) Sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, “manajemen hak informasi” berarti informasi yang mengidentifikasi pekerjaan, penulis karya, pemilik hak dalam bekerja, atau informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan pekerjaan, dan setiap nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, ketika salah satu item informasi yang melekat pada salinan dari suatu karya atau muncul sehubungan dengan komunikasi sebuah karya publik.

Menurut Simon Fitzpatrick terdapat lima (5) prinsip dasar WIPO *Copyright Treaty* yang diterapkan pada hak cipta di *cyberspace*. Prinsip dasar tersebut adalah:⁸

1. Bahwa WIPO Copyright Treaty ini secara tegas menyatakan bahwa hak reproduksi di dalam Article 9 Konvensi Berne dapat diterapkan juga dalam lingkungan digital.
2. Norma diadaptasi untuk familier kedalam penyiaran dan penyatuan hak kedalam kelayakan hak tunggal untuk lingkungan pemusatan media.
3. Norma membolehkan Negara untuk membawa kedepan dan memperluas dalam batasan lingkungan digital dan pengecualian dalam hukum nasional yang mana hal itu dapat diterima dibawah konvensi Berne.
4. Norma mempersyaratkan ganti rugi secara hukum yang layak dan efektif untuk perlindungan teknologi yang digunakan oleh pemilik hak cipta.
5. Norma dimanfaatkan untuk menetapkan ganti rugi yang layak dan efektif terhadap percobaan mengalihkan hak manajemen informasi yang dapat diketahui atau menyetujui dalam memperbanyak karya-karya yang mana telah dialihkan atau diubah hak manajemen informasi elektronik.

Maka dilihat dari prinsip-prinsip diatas maka WIPO *Copyright Management* telah memberikan beberapa prinsip perlindungan hukum untuk karya cipta yang diumumkan melalui media digital termasuk radio internet.

3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang hak cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seperti halnya karya cipta buku, karya cipta lukisan, patung, karya

⁸ Simon Fitzpatrick, *Prospects Of Further Copyright harmonization, European Intellectual Property Review*, 2003, hal 4

pertunjukan, karya siaran dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produsen rekaman suara dan lembaga penyiaran, yang masing-masing memiliki hak khusus yang dilindungi oleh hak cipta.

Konsep dasar perlindungan hak cipta (*The Basic Concepts of Copy Right Protection*) disetiap Negara yang berlaku secara *universal* termasuk di Indonesia, konsep perlindungan hak cipta itu sendiri menyangkut : berupa benda apa yang dilindungi, bagaimana terjadinya perlindungan, dan sejauh mana perlindungan itu diberikan.

Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan-ketentuan hukum hak cipta diberbagai Negara, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah:⁹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli
Dapatlah ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan merupakan hasil plagiat merupakan syarat yang wajib atau harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*)
Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.
3. Suatu Ciptaan tidak perlu atau tidak harus selalu diumumkan untuk mendapatkan atau memperoleh hak cipta
Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

⁹ Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, *neighbouring right* dan *collecting society*)**, PT.Alumni, Bandung, 2008, hal 67

Seseorang membeli DVD sebuah film, berarti seseorang tersebut adalah pemilik DVD yang berisikan film tersebut adalah pemilik DVD yang berisikan film tersebut, tetapi pemilik DVD film tersebut bukan merupakan pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang ada dalam DVD tersebut. Jika orang tersebut memperbanyak DVD film yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta.

5. Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (*absolute*)

Didalam hak cipta tidak mengenal adanya konsep monopoli penuh sehingga memungkinkan seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu diketahui disini adalah bahwa suatu ciptaan yang muncul belakangan bukan merupakan suatu duplikasi atau suatu perbuatan penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Di dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang merupakan bagian dari penjiplakan murni dengan bagian yang bukan merupakan penjiplakan murni itu bukanlah hal yang mudah.

Hak cipta sendiri adalah sebuah kumpulan hak (*copyright is a multiple right or a bundle of right in one work*). Hak-hak di dalam hak cipta yaitu :

1. Hak Moral (*Moral Right*)¹⁰

Mengenai Hak Moral, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Dan pengertian Hak Moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku)¹¹ yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus begitu saja tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain bahwa ada hubungan diantara keduanya.

¹⁰ D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to peer communication* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal 68

¹¹ Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya. UUHC, pasal 1 (10)

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Moral itu sendiri telah diatur di dalam pasal 24 yang menyatakan:

Pasal 24¹²

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Apapun istilah-istilah untuk menamai hak moral yang terdapat dalam hak cipta, intinya adalah bahwa terdapat sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain hanya boleh atau bisa menjalankan hak itu apabila diminta oleh pencipta atau setelah pencipta meninggal duni dapat dilakukan oleh pemegang ahli warisnya.

2. Hak Ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Berbeda dengan hak moral, pencipta yang dewasa ini sudah mendapat sudut pandang yang sama dari berbagai Negara terutama di para anggota pengikut konvensi Berne, menyangkut hak ekonomi tidak ada kesamaan pandangan di antara berbagai Negara, baik yang menyangkut terminologinya maupun yang menyangkut ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku itu terjadi karena:¹³

1. Masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasian;

¹² UUHC, pasal 24

¹³ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal 125

2. Sering terjadi pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan produser rekaman suara;
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.

Terdapat 6 (enam) macam hak yang dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu:¹⁴

1. *The Production Right* atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam konvensi Berne, *Universal Copyright Convention* (UCC) maupun hukum hak cipta yang terdapat di setiap Negara. Hak ini sendiri pada hakekatnya adalah memberikan izin untuk memproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print) atau cara mekanik. Itu sebabnya hak reproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.
2. *The adaptation right* adalah hak memberikan izin untuk melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain. *The adaptation right* telah jelas diakui oleh *The Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*. Soal terminology, ada juga yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaptation right* dan *translation right*.
3. *The distribution right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk dalam hal ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya *cinematography* di dalam *The Bern Convention*.

¹⁴ Taryana Soenandar, **HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 40

4. *The public performance right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya cipta kepada publik. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan adalah *performing right* yang didalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung maupun melalui penyiaran (*broadcast*).
5. *The broadcasting right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* disini adalah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.
6. *The cable casting right* atau hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini yaitu: *cable transmission* dan *cable origination*. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada (*pre-existing*). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah karya.

Dan untuk pengumuman suatu karya cipta yang disiarkan atau diumumkan melalui media Radio Internet harus memenuhi hak yang terdapat dalam kategori *The Broadcasting Right* yaitu hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya cipta dengan pentransmisian tanpa kabel.

3. Hak Terkait (*Neighbouring Right*)

Hak Terkait pada umumnya diartikan sebagai hak untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku, produser-produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran sehubungan dengan aktivitas-aktivitas mereka yang berkenaan dengan penggunaan secara umum suatu ciptaan seorang pencipta, semua bentuk pertunjukan oleh artis-artis atau menyiarkan kepada umum pertunjukan-pertunjukan, informasi dan suara-suara atau gambar-gambar hidup. Golongan-golongan utama yang termasuk didalamnya adalah :

1. Hak pelaku-pelaku untuk melarang penggunaan tanpa izin pembuatan gambar (*fixation*), menyiarkan rekaman suara atau mengkomunikasikan kepada umum dari pertunjukannya;
2. Hak produser rekaman suara untuk memberi izin atau melarang reproduksi karya rekaman suara mereka dan melarang pengimporan dan pendistribusian produk-produk bajakan rekaman suara;
3. Hak lembaga penyiaran untuk memberi izin atau melarang menyiarkan ulang atau memproduksi karya siaran mereka.

Hak terkait sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu seperti hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Apabila dikaitkan dengan prinsip mengumumkan yang terkandung dalam pasal 1 ayat 5 maka Radio Internet merupakan salah satu alat atau media guna untuk melakukan tindakan pengumuman, dan apabila prinsip mengumumkan yang terkandung dalam pasal 1 ayat 5 dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang akan melakukan tindakan mengumumkan atau memperbanyak hanyalah pihak yang memiliki hak eksklusif atau pihak yang telah mengadakan perjanjian atau lisensi terhadap pihak yang telah memiliki hak eksklusif dengan kata lain ialah pencipta. Apabila pihak Radio Internet telah melakukan tindakan mengumumkan suatu karya cipta tanpa adanya hak eksklusif atau tanpa adanya suatu perjanjian atau lisensi terhadap pihak pencipta maka pihak Radio Internet telah melakukan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

4. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Radio Internet

a. Aturan Hukum Hak Cipta di dalam Radio Internet

Di dalam situs radio internet luar negeri membuat halaman yang mengatur tentang hak cipta, agar pengguna radio internet bisa mengetahui lebih dalam mengenai hak cipta, bentuk perlindungan dan apa saja akibat hukum apabila terjadi perbuatan pelanggaran hak cipta di dalam situsnya. Akan tetapi di halaman hak cipta radio internet tidak menjelaskan secara rinci pengertian hak cipta, tetapi mengatur jenis-jenis karya apa saja yang harus mematuhi hak cipta, bagaimana

cara menggunakan karya-karya yang bermateri hak cipta tanpa melanggar, keputusan hak cipta, perbedaan merek dagang dan paten, serta perbedaan antara hak cipta dan privasi. Mengenai syarat dan ketentuan yang terdapat di radio internet dapat dilihat di dalam syarat dan ketentuan yang terdapat di situs radio internet tersebut, seperti halnya radio internet :

1. BBC
2. Iheart
3. SKY fm

Sedangkan di Radio Internet yang berada dalam wilayah Negara Indonesia bahkan rata-rata kebanyakan tidak mencantumkan syarat dan ketentuan hak milik atau *copyright* ke dalam situs Radio Internetnya seperti halnya contoh Radio Internet di Indonesia yang tidak mencantumkan syarat dan ketentuan hak milik atau *copyright*:

1. Radio Surabaya
2. Suara Surabaya
3. Makobu FM
4. Pambors
5. Trijaya FM

Sedangkan Karya Cipta Lagu sendiri memiliki ketentuan perlindungan hak ekonomi terhadap karya cipta lagu atau musik yang disiarkan melalui media radio internet. Perlindungan itu telah diatur di dalam pasal 1 angka 1 UUHC, bahwa sebuah hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu. Berdasarkan ketentuan ini, pengumuman atau perbanyakan suatu karya cipta lagu memerlukan izin yang berupa bentuk lisensi atau suatu perjanjian dari pemegang hak cipta lagu. Dan apabila dihubungkan dengan penyiaran karya cipta lagu di radio internet, pasal 1 angka 5 UUHC mengatur bahwa, pengumuman merupakan penyiaran suatu ciptaan dengan media apapun, alat apapun, termasuk internet, sehingga suatu ciptaan dapat didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, penyiaran karya cipta lagu melalui media radio internet atau yang disebut juga dengan web-radio merupakan suatu media pengumuman hak cipta lagu melalui

media internet yang telah diatur di dalam UUHC.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Radio Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sengketa hak cipta itu sendiri terdiri dari sengketa perdata ataupun pidana.

Dalam hal sengketa perdata, maka mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian melalui arbitrase sendiri ialah upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, jadi apabila para pihak ingin melakukan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase maka harus membuat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju apabila terjadi sengketa akan melakukan penyelesaian melalui proses penyelesaian dengan arbitrase dan perlu diingat bahwa proses arbitrase putusannya bersifat *final* dan *binding*, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian dalam lingkup luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan perlu diingat bahwa putusan dari alternatif penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Apabila, putusan alternatif penyelesaian sengketa ini belum memberikan rasa keadilan pada salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga. Upaya penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 55-66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Apabila mengenai tata cara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga telah diatur dalam pasal 60-61 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sementara itu untuk sengketa hak cipta yang mengandung unsur pidana dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Di mulai dari proses penyidikan,

penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Tetapi mengenai proses sengketa Hak Cipta yang mengandung unsur pidana tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang tahapan penyidikan yang tercantum dalam Pasal 71. Dan di dalam Undang-undang Hak Cipta juga mengatur tentang pembebanan dan hukum penjara bagi pelanggaran Hak Cipta yang mengandung unsur tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 72.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum yang diberikan pihak Radio Internet di Negara-negara lain dalam melindungi Hak Cipta pengguna tertuang dalam halaman syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situsnya. Dokumen hukum tersebut merupakan bentuk perjanjian antara Pihak Radio Internet dengan pengguna terkait aktifitas yang terdapat dalam situs Radio Internet, dalam halam syarat dan ketentuan tersebut berisi mengenai syarat-syarat dan ketentuang berlaku yang harus dipatuhi, dan juga berisi mengenai hak dan kewajiban mengenai hak cipta antara pengguna dan pihak Radio Internet dalam hal ini selaku penyelenggara sistem elektronik.

Sedangkan tanggung jawab hukum yang diberikan pihak Radio Internet di Negara Indonesia kurang memadai untuk perlindungan hukum hak cipta. Di dalam situs Radio Internet di Negara Indonesia tidak ada syarat dan ketentuang yang berlaku untuk melindungi materi-materi yang terkandung dalam situs Radio Internet di Negara Indonesia terutama dalam hal perlindungan hukum hak cipta.

2. Pengaturan hukum tentang hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1. Pengaturan hukum tersebut merupakan perlindungan atas keaslian karya cipta dan hak-hak yang terkandung dalam ciptaan untuk si pencipta atas karya ciptanya.
3. Apabila terjadi penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta oleh pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan 2 (dua) jalur, yakni jalur litigasi

atau pengadilan dan jalur alternatif yaitu penyelesaian di luar pengadilan (arbitrase atau perjanjian) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

B. SARAN

Perlindungan Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak Radio Internet selaku penyelenggara sistem elektronik di Negara-negara lain di luar Negara Indonesia dirasa cukup baik, namun perlindungan hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak Radio Internet di Negara Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik masih kurang memadai, maka terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan situs Radio Internet yang terdapat di wilayah Negara Indonesia dalam hal ini termasuk penggunaan materi yang berhak cipta.
2. Perlu adanya pemberian syarat dan ketentuan yang terdapat dalam situs Radio Internet di wilayah Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan membatasi penggunaan materi yang terkandung di dalam situs Radio Internet tersebut.
3. Perlu adanya perwakilan dari pihak Radio Internet di seluruh Indonesia sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum yang terjadi dalam situs Radio-radio Internet di Indonesia.
4. Bagi pengguna Radio Internet disarankan agar lebih hati-hati dalam menggunakan layanan situs tersebut, serta memahami aturan terkait Hak Cipta yang berlaku secara jelas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta.
5. Pemerintah perlu memberikan atau mengadakan pengarahan atau pengetahuan secara khusus dalam hal ini dibidang Hak Cipta kepada masyarakat umum baik melalui jalur pendidikan di taraf sekolah, maupun Universitas (dalam hal ini tidak secara khusus di dalam Fakultas Hukum tetapi juga di beberapa ilmu pengetahuan yang lain) dengan mencantumkan syarat dan ketentuan umum maupun yang bersifat khusus mengenai batasan-batasan yang terdapat didalam pelanggaran Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku

Asril Sitompul, **Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

D.Friedman P, **Analisis Hak Konsumen Dalam Hal Perolehan Karya Cipta Lagu Melalui Internet dalam pola *peer to peer communication* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Muchammad Nurachmad, **Segala Tentang HAKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.

Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu, *neighbouring right* dan *collecting society*)**, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Simon Fitzpatrick, *Prospects Of Further Copyright harmonization, European Intellectual Property Review*, 2003.

Taryana Soenandar, **HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Undang-Undang dan peraturan lainnya

Indonesia, **Undang-Undang Tentang Hak Cipta. No. 19 Tahun 2002.**

WIPO *Copyright Treaty*